

ANALISIS POTENSI BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PANTAI AMAL KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bergaz Rahina¹⁾, Ratika Tulus Wahyuhana²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: bergazra1701@gmail.com

Abstrak

Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat adalah suatu konsep pengembangan wisata dimana masyarakat atau warga setempat berperan penting sebagai produsen pariwisata dan sebagai pelaku utama dalam pengambilan keputusan serta memberi manfaat untuk kehidupan dan lingkungan mereka. Pantai Amal merupakan salah satu tempat wisata pantai yang terdapat di Kota Tarakan selain Pantai Binalatung. Kondisi Pantai Amal masih banyak kekurangan seperti pengelolaan Pantai Amal yang belum optimal meliputi tingkat partisipasi masyarakat yang minim karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola wisata, infrastruktur yang masih belum lengkap dari segi prasarana dan sarana. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Pantai Amal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 2 informan melalui Teknik purposive sampling, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di Pantai Amal masih minim yaitu pada tingkat penentruman (*placation*) dan kemitraan (*partnership*), dimana kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pariwisata, kurangnya aspirasi masyarakat serta perlunya pengoptimalan pemberdayaan masyarakat di Pantai Amal di karenakan Pantai amal memiliki potensi menjadi wisata unggulan karena memiliki lahan yang luas sehingga dapat menambah atraksi untuk menjadi daya tarik wisatawan.

Kata Kunci: *Community Based Tourism*, Partisipasi Masyarakat, Pantai Amal

Abstract

Community Based Tourism (CBT) is a tourism development concept where the community or local residents as tourism producers play an important role and the main actors in decision making that affects and benefits their lives and environment. Amal Beach is one of the beaches tourism in Tarakan City in addition to Binalatung Beach. The condition of the Charity Coast is still many shortcomings such as the management of the Charity Coast that has not been optimal including the level of community participation that is minimal due to lack of public awareness in managing tourism, infrastructure that is still incomplete in terms of infrastructure and facilities. To that end, the study aims to analyze the form and level of community participation that exists on the Charity Coast. The research used is qualitative research method. Data collection is done by interviewing 2 informants through purposive sampling techniques, observations, documentation, and interviews. Analysis uses qualitative descriptive analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. The results showed the form and level of community participation on the Amal Coast is still minimal at the level of reassurance (*placeation*) and partnership (*partnership*), where public awareness is still lacking in tourism, lack of community aspirations and the need for optimization of community empowerment on the Amal Coast because the charity beach has the potential to become a superior tourism because it has a luas land so that it can add attractions to become a tourist attraction.

Keywords: *Amal Beach, Community Based Tourism, society participation,*

1. PENDAHULUAN

Pantai merupakan suatu kawasan yang terletak pada perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai juga merupakan sektor penting untuk pariwisata karna memiliki daya tarik tersendiri. Dahuri et. al (2004) mengartikan wisata pantai sebagai kegiatan rekreasi yang dilakukan di sekitar pantai. Wisata pantai juga terdiri dari dua kategori seperti kategori rekreasi dan wisata mangrove (Yulianda F, 2007).

Latihan pengembangan pariwisata, serta peningkatan di berbagai bidang, pada dasarnya mencakup pekerjaan semua mitra saat ini dan yang terkait. Menurut Rahim dan Murphy (2012), mitra dalam pariwisata dibagi menjadi 3 kelas, yaitu: Pemerintah, Swasta dan Komunitas, dengan kewajiban dan kapasitasnya masing-masing. Mitra ini tidak dapat tinggal sendiri, tetapi harus bersinergi satu sama lain untuk dapat memahami tujuan dan target perbaikan yang disepakati.

Sunaryo (2013) mengungkapkan bahwa daerah sebagai salah satu mitra memiliki posisi dan tugas yang signifikan dalam mendukung pencapaian kemajuan industri perjalanan wisata. Mulai dari sistem penataan hingga pelaksanaan latihan peningkatan industri perjalanan wisata, dan untuk membantu pencapaian kemajuan industri perjalanan wisata, setiap upaya atau program peningkatan yang dilakukan harus fokus pada posisi, potensi, dan pekerjaan daerah setempat sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Salah satu gagasan yang memperjelas tugas daerah setempat dalam peningkatan industri perjalanan adalah *Community Based Tourism* (CBT).

Gagasan CBT umumnya dimanfaatkan oleh para perencana kemajuan industri perjalanan untuk mempersiapkan jaringan agar dapat berperan serta secara efektif dikembangkan sebagai akomodasi di industri perjalanan. Objektif hanyalah penguatan keuangan daerah itu sendiri, dan menempatkan nilai lebih dalam industri perjalanan, terutama untuk wisatawan (Hermantoro, 2011: 130).

Kota Tarakan terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan memiliki

beberapa objek wisata salah satunya Pantai Amal. Pantai Amal terletak di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Pantai Amal menjadi salah satu objek wisata di Kota Tarakan yang cukup banyak dikunjungi wisatawan. Pantai Amal memiliki atraksi yang terkenal yaitu perayaan adat tradisional yang bernama Iraw Tengkeyu dan juga mempunyai kuliner yang khas bernama Kappah, selain itu juga Pantai Amal memiliki pemandangan yang cukup indah untuk melihat matahari terbit.

Dari sisi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan, permasalahan yang tampak dalam pengelolaan objek wisata Pantai Amal antara lain belum adanya SDM industri wisata berbasis di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan, pembinaan dan pembinaan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan ke daerah sekitarnya, tidak adanya kesadaran masyarakat

Pantai amal memiliki banyak potensi untuk dikembangkan karena aksesibilitas Pantai Amal dapat dikatakan baik. Masyarakat yang memiliki keterampilan dalam mengelola hasil tangkapan laut, dan juga Pantai Amal memiliki lahan yang sangat luas sehingga mampu menambah atraksi dan dapat meningkatkan daya tarik wisata Pantai Amal, Berdasarkan hal tersebut perlunya pengoptimalan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengelola Pantai Amal menjadi lebih optimal dapat menambah atraksi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Pantai Amal.

2. KAJIAN LITERATUR

A. Partisipasi

Seperti yang ditunjukkan oleh Cohen dan Uphoff (1977), yang disinggung dalam Harahap (2001), dukungan adalah inklusi wilayah lokal dalam sistem pengaturan dan pilihan mengenai apa yang harus dilakukan, dalam pelaksanaan program dan dinamis untuk menambah aset atau latihan eksplisit, berbagi keuntungan dari proyek perbaikan dan penilaian program kemajuan. Untuk sementara, menurut Ndraha (1990),

disinggung dalam Lugiarti (2004), investasi daerah dalam siklus perbaikan dapat dipisahkan menjadi; (1) dukungan dalam atau melalui kontak dengan pertemuan yang berbeda sebagai awal dari perubahan sosial, (2) kerjasama dalam memfokuskan dan bereaksi terhadap data, baik dalam perasaan menoleransi, menoleransi secara terbatas, atau dalam mengabaikannya, (3) investasi dalam mengatur termasuk dinamis, (4) kerjasama dalam pelaksanaan, (5) minat dalam pelaksanaan kemajuan pelaksanaan, dan kemajuan hasil-hasil perbaikan, khususnya kontribusi daerah dalam mensurvei derajat pelaksanaan.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat

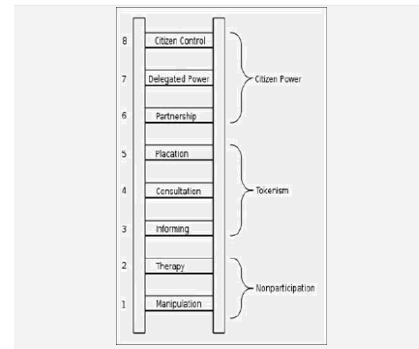
Ada beberapa jenis bentuk partisipasi masyarakat, yaitu bantuan tunai, bunga properti, investasi kerja, investasi kemampuan, minat pikiran, dukungan sosial, dukungan dalam interaksi yang dinamis, dan minat delegasi. Dengan berbagai jenis kerjasama yang dirujuk, jenis investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu jenis dukungan yang diberikan dalam struktur yang jelas (memiliki struktur) dan lebih lanjut jenis bunga yang diberikan sebagai tidak berwujud (konseptual). Jenis bunga yang jelas adalah uang tunai, properti, pekerjaan dan kemampuan, sedangkan jenis investasi yang sulit dipahami adalah kerjasama pikiran, dukungan sosial, dinamis dan kepentingan agen. Dalam dunia yang sempurna, jenis asosiasi area lokal yang sedang dikembangkan rencana dimulai dari deklarasi publik, tinjauan formal, dan konferensi publik hingga kerjasama area lokal dalam pergantian acara lokal. Idealnya, bentuk pelibatan masyarakat dalam rencana pengembangan dimulai dari pengumuman (*public announcement*), *public hearing*, dan konsultasi publik hingga partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan (Ratika, 2019).

C. Tingkat Partisipasi

Sherry Arnstein dengan cepat mengkarakterisasi sistem partisipatif yang bergantung pada apropriasi kekuatan antara wilayah lokal (local area) dan kantor pemerintah (kantor). Dengan menyatakan bahwa dukungan residen adalah kekuatan residen, Arnstein menggunakan analogi

bangku investasi di mana setiap anak tangga bangku loncatan membahas prosedur bunga alternatif yang bergantung pada perampasan kekuatan.

- a) Tangga partisipasi menurut Arnstein (1969)



Sumber: Google, Tangga Partisipasi Arnstein, 2021

Gambar 1. Tangga Partisipasi

- a) *Manipulation*, Pemerintah desa mendidik sebagian masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.
- b) *Therapy*, Pemerintah desa menyampaikan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat, namun masyarakat hanya mendengarkan saja.
- c) *Informing*, Pemerintah desa menyampaikan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat, namun masyarakat hanya menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik.
- d) *Consultation*, Terjadi dialog antar kedua pihak, namun keputusan akhir ada ditangan pemerintah desa.
- e) *Placation*, Pemerintah desa menerima kritik dan saran, namun Pemdes tetap menjalankan rencana semula
- f) *Partnership*, Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam menjalankan program kerja.
- g) *Delegated Power*, Pemerintah desa mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat dan masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- h) *Citizen Control*, Kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat kuat, bahkan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintah desanya.

Bangku loncatan terkecil membahas kondisi non-investasi, termasuk: (1) (kontrol) dan (2) (pengobatan). Kemudian, pada saat itu, diikuti oleh langkah (3) pencerahan, (4) nasihat, dan (5) menenangkan, di mana tiga bangku loncatan digambarkan sebagai tingkat postur. Kemunafikan dapat diartikan sebagai pengaturan dasar, sebagai pengerahan tenaga yang dangkal (dangkal, menurut semua akun) atau kegiatan simbolis dalam mencapai suatu tujuan. Jadi itu hanyalah alasan komitmen yang sederhana dan bukan pekerjaan nyata untuk memasukkan area lokal secara serius. Bangku loncatan berikutnya adalah (6) organisasi (asosiasi), (7) penunjukan kekuasaan atau kekuatan (assigned force), dan (8) kontrol wilayah lokal (resident control). Tiga bangku loncatan terakhir ini menunjukkan perubahan yang belum ditentukan kekuatan yang dipikirkan Arnstein tentang jenis dukungan publik yang sebenarnya.

1. (Kontrol). Di bangku pijakan pendukung, cenderung diuraikan bahwa pada umumnya tidak ada korespondensi, apalagi wacana; Intinya bukan untuk memasukkan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program tetapi untuk mengajar atau "memperbaiki" anggota (daerah tidak memiliki petunjuk tentang alasan dengan cara apapun, namun tersedia dalam pertemuan).

2. (Pengobatan). Pada tingkat ini telah ada korespondensi namun dibatasi. Drive berasal dari otoritas publik dan hanya satu arah. Bangku loncatan ketiga, keempat dan kelima dirangkai sebagai tingkat kemunafikan dimana pekerjaan daerah ditawarkan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka, namun mereka tidak bisa mendapatkan kepastian bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh kepala suku. . Investasi pada tingkat ini hampir tidak memiliki kesempatan untuk mencapai perubahan di arena publik.

3. Informasi (data). Pada tingkat ini korespondensi sudah mulai banyak terjadi namun masih bersifat satu arah dan belum ada cara untuk berkorespondensi. Data sudah diberikan ke daerah, namun daerah belum diberi kesempatan untuk memberikan kritik.

4. Diskusi (pertemuan). Pada tahap dukungan ini, korespondensi adalah dua arah, tetapi itu masih merupakan investasi khusus. Sudah ada penyaringan keinginan, ada aturan untuk memberikan saran, ada kepercayaan bahwa tujuan individu akan didengar, namun tidak ada jaminan apakah keinginan tersebut akan terwujud atau perubahan akan terjadi.

5. Harmoni (penghiburan). Pada tingkat ini korespondensi telah berjalan secara positif dan telah terjadi kesepakatan antara daerah setempat dan otoritas publik. Kelompok masyarakat bebas memberikan ide atau rencana latihan yang diusulkan. Bagaimanapun, otoritas publik sebenarnya memegang posisi untuk memutuskan wilayah dan keberadaan. Tiga bangku loncatan utama disusun sebagai bentuk kerja sama yang nyata di mana daerah setempat memiliki pengaruh dalam interaksi yang dinamis.

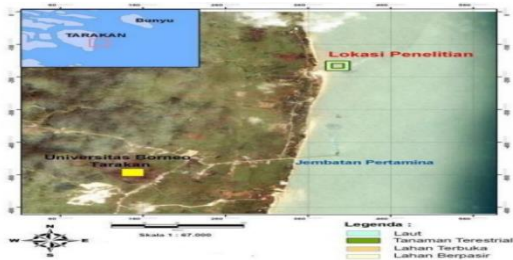
6. Organisasi (asosiasi). Di bangku loncatan investasi ini, otoritas publik dan daerah adalah kaki tangan yang setara. Kekuatan telah diberikan dan telah terjadi kesepakatan antara daerah setempat dengan para pemegang kekuatan, baik dari segi penataan, pelaksanaan, hingga pengecekan dan penilaian. Individu yang belum mendekati siklus dinamis ditawarkan kesempatan untuk mengatur dan menyelesaikan pengaturan.

7. Penugasan kekuatan (kekuatan yang ditunjuk). Artinya, otoritas publik memberikan kepada daerah kekuasaan untuk menangani keuntungannya sendiri, mulai dari langkah-langkah pengaturan, pelaksanaan, pengamatan dan penilaian, sehingga daerah jelas dan bertanggung jawab penuh atas pencapaian program. Pengendalian warga (*citizen control*). Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

8. Kontrol penduduk. Dalam langkah investasi ini, daerah setempat sepenuhnya mengawasi berbagai latihan untuk keuntungan mereka sendiri, yang biasanya diselesaikan, dan tanpa mediasi pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Pantai Amal berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara lebih tepatnya berada di kecamatan Tarakan Timur. Gambar 2 menunjukkan posisi Pantai Amal.



Sumber: Google Lokasi Pantai Amal, 2021

Gambar 2. Lokasi Pantai Amal

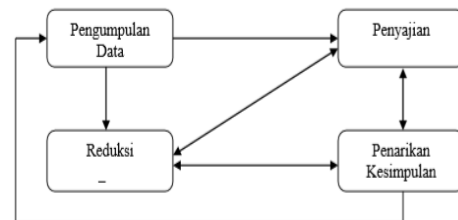
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian akan menjelaskan secara deskriptif mengenai kondisi bentuk dan tingkat partisipasi Pantai Amal.

Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, survei dokumen dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi objek wisata Pantai Amal menurut potensi dan bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat disana. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai tingkat dan partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber dengan teknik *purposive sampling*, mencakup pengelola objek wisata Pantai Amal, Dinas Pariwisata dan masyarakat. Survei instansi dilakukan ke Dinas Pariwisata. Sedangkan telaah dokumen dan dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar di lokasi penelitian serta menelaah literatur terkait dengan Pantai Amal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil analisis dijelaskan secara deskriptif dengan mengkompilasikan hasil temuan dari berbagai sumber, yaitu hasil observasi, wawancara, survei, telaah dokumen dan dokumentasi yang telah diperoleh untuk melihat bentuk dan tingkat partisipasi. Analisis deskriptif wisata ini digunakan sebagai alat dalam melihat apa saja potensi yang ada dalam pengembangan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat

Pantai Amal.

Penelitian pada Pantai Amal menggunakan analisis data dengan *Analysis Interactive*. Analisis data ini bertujuan untuk penarikan kesimpulan melalui data-data yang telah dikumpulkan, disajikan dan data yang telah direduksi. Adapun alur analisis dengan *Analysis Interactive* seperti dalam bagan di Gambar 3 berikut (Miles & Huberman, 1994).



Sumber: Miles & Huberman, 1994

Gambar 3. Proses Analisis Data Interaktif

a) Reduksi data (*Data Reduction*)

Tindakan pengurangan informasi dalam tinjauan ini adalah menuangkan hasil pertemuan ke dalam pembicaraan dengan catatan dengan mengubah hasil pertemuan dari struktur rekaman menjadi struktur tersusun kata demi kata (*talk with record*). Efek samping dari persepsi dan berbagai catatan yang terkait dengan pusat pemeriksaan digunakan lebih dari satu kali untuk memahami secara tepat informasi atau hasil yang diperoleh. Hasil dari tahap ini adalah mendapatkan garis besar realitas saat ini sebagai unit pemeriksaan informasi subjektif dan strategi untuk mengumpulkan dan membuat kesimpulan dari penyelidikan perbaikan informasi yang diperoleh oleh analisis yang melakukan pengkodean. Informasi penting dikodekan, kemudian, pada saat itu, dikumpulkan tergantung pada struktur logis yang telah dibuat.

Peneliti juga melakukan pengkodean dengan melihat hasil transkrip wawancara, dengan contoh Bergaz disingkat menjadi MI, hasil wawancara ketika pertama kali melakukan wawancara diberi kode W1, Tanggal dilakukannya wawancara ditulis sesuai tanggal dilakukannya wawancara 11112021, dan untuk melihat urutan wawancara yang telah didapatkan dengan rumusan masalah maka dihitung per baris form wawancara 1-5. Maka dari hal tersebut

didapatkan pengkodean dengan uraian MI, W1, 11112021, 1-5. Pengelompokan data ini berdasarkan analisis yang dilakukan dan tersusun sebelumnya, dengan melihat potensi pengembangan objek wisata pantai tersebut.

Dalam tinjauan ini, analisis menyelidiki konsekuensi dari pertemuan tergantung pada pemahaman tentang hal-hal yang dikomunikasikan oleh responden. Informasi rekaman yang telah dikumpulkan tergantung pada pengkodean oleh para ilmuwan dicoba untuk dipahami sepenuhnya dan menemukan topik dan slogan yang signifikan. Setelah ilmuwan memutuskan topik, analisis juga dapat memahami pertemuan, masalah, dan elemen yang terjadi dalam subjek.

b) Penyajian (Data Display)

Show of information adalah akumulasi dari sekumpulan data yang memberikan adanya pencapaian penentuan dan kegiatan menggambar. Dalam pemeriksaan ini, sebenarnya informasi yang akan diperkenalkan berupa teks akun, tabel, foto, outline.

c) Gambar Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari eksplorasi subjektif ini dapat menjawab perincian masalah yang telah direncanakan, namun mungkin tidak dengan alasan bahwa masalah dan definisi masalah pemeriksaan subjektif masih singkat dan akan dibuat setelah pemeriksaan di lapangan. Bahkan, cara yang paling umum untuk mencapai penentuan dalam tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan strategi triangulasi sumber informasi, di mana para ilmuwan memeriksa informasi yang ditemukan di lapangan dengan hipotesis yang diingat untuk bagian audit penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan memiliki luas keseluruhan wilayah 657,33 km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 250,80 km² dan luas wilayah lautan 406,53 km². Secara administrasi Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan dengan luasan masing-masing Kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (58,01 km²), Tarakan Tengah (55,54 km²), Tarakan Barat (27,89 km²), dan Tarakan Utara (109,36 km²). Kota Tarakan

memiliki 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan:

- Kecamatan Tarakan Timur: Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Gunung Lingkas, dan Kelurahan Lingkas Ujung.
- Kecamatan Tarakan Tengah: Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, dan Kelurahan Kampung Satu Skip.
- Kecamatan Tarakan Barat: Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan Kelurahan Karang Harapan.
- Kecamatan Tarakan Utara: Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Juata Kerikil, dan Kelurahan Juata Laut.

Untuk lebih jelasnya Kota Tarakan dapat melihat peta pada Gambar 4.



Sumber: Google Peta Administrasi, 2021

Gambar 4. Peta Administrasi Kota Tarakan

Secara topografi kondisi Kota Tarakan meliputi kawasan dataran rendah hingga berbukit. Kota Tarakan memiliki topografi dominan dataran rendah dengan ketinggian masing-masing kecamatan rata-rata kurang lebih 18 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Kota Tarakan memiliki kondisi topografi di masing-masing kecamatan, antara lain: 1) Kecamatan Tarakan Timur (12,00 mdpl), 2) Kecamatan Tarakan Tengah (15,00 mdpl), 3) Kecamatan Tarakan Barat (28,00 mdpl), dan 4) Kecamatan Tarakan Utara (17,00 mdpl).

Kota Tarakan memiliki kondisi pantai yang sangat landai. Sebagian kecil dari

wilayah pantai merupakan halangan pasir dan sebagian besar mengalir, yaitu wilayah pantai dipengaruhi oleh pasang surut. Wilayah ini padat oleh vegetasi mangrove dan nipah.

Lahan Kota Tarakan dengan luas 25.080 Ha digunakan untuk berbagai jenis penggunaan lahan. Dilihat dari informasi contoh penggunaan lahan Kota Tarakan tahun 2018, cenderung terlihat bahwa sebagian besar lahannya masih berupa hutan semak belukar (34%). Penggunaan lahan terbesar berikut ini adalah kombinasi semak belukar dan pengembangan sebagai ladang dan ladang (32%). Kawasan buatan metropolitan tersebar di 4 sub-lokal, dengan luas wilayah 1.376 hektar atau sekitar 5,5% dari total luas daratan Kota Tarakan.

Kota Tarakan memiliki objek wisata beragam, mulai dari mulai dari wisata adat, wisata sejarah (situs), wisata bahari dan wisata lainnya. Dari beberapa potensi wisata di Kota Tarakan tersebut, wisata bahari menjadi wisata yang sering ramai dikunjungi seperti di objek wisata Pantai Amal dan Pantai Binalatung.

4.2 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Pantai Amal

Bentuk Partisipasi masyarakat di Pantai Amal sendiri menggunakan jenis bentuk nyata salah satunya tenaga. Pihak yang melakukan bentuk pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah dan komunitas. Untuk pemerintahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat diberi nama Pesonna Indonesia dan untuk komunitas yang melakukan pemberdayaan masyarakat dengan nama kumunitas Wawasan Lingkungan Hidup, Komunitas Bebas Sampah, Pencinta Alam, dan Kodam TNI, dan untuk partisipasi dilakukan oleh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait.

Berikut hasil observasi lapangan dari wawancara kepada pihak masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku utama dari hasil bentuk pemberdayaan :

“... Kalau yang pelatihan itu sudah ada, sebagai komoditi kolektif untuk pemanfaatan warga di Pantai Amal, kalau secara ekonominya yang menarik wisatawan lokal seperti hasil laut Pantai Amal dijadikan kuliner, warung makan khas nelayan....” (TH W2 17112020, 1-2)



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 5 Kuliner khas Pantai Amal

“...Ekonomi seperti peningkatan kualitas mutu makanan dan kualitas pelayanan melalui pelatihan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau pelestarian yakni kegiatan reklamasi pantai yang telah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2007 namun tidak ada perhatian selanjutnya. Sekarang kembali lagi adanya pembangunan perencanaan peningkatan kualitas objek wisata oleh pihak pemerintah....” (TH W2 171120202, 3-4)



Sumber: Google Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, 2021

Gambar 6 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pemerintah melakukan program pemberdayaan untuk pelaku usaha dan juga masyarakat yang tinggal di kawasan Pantai Amal dalam pelatihan tersebut masyarakat diberi tahu cara agar mengelola Pantai Amal dari segi ekonomi, kuliatas mutu makan, pelayanan, dan lingkungan. Pengelolaan dibidang lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah. Hasil observasi lapangan terkait kebersihan lingkungan berupa wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

“...Kebersihan sekitar lokasi setiap yang memiliki tempat untuk usaha, peraturan untuk tidak membuang sampah ke laut. Mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi, menggeruk pasir penyebab tersumbatnya aliran sungai ke laut. Menanan pohon disekitar tempat usaha....”



Amal :

Sumber: Google Kegiatan Bersih-Bersih Kawasan Pantai Amal, 2021

Gambar 7 Kegiatan Bersih-Bersih Kawasan Pantai Amal

Dari segi ekonomi pemerintah berfokus pada inovasi atau *sell branding* yang mampu menarik para wisatawan seperti hasil tangkapan laut dari nelayan di olah menjadi kuliner yang khas berupa kuliner Kappah yang merupakan ciri khas makanan di pantai tersebut dan untuk pengelolaan lingkungan Pemerintah membuat reklamasi pembuatan siring agar tidak terjadi abrasi, himbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Pantai Amal agar mengurangi penggunaan sampah plastik serta menjaga kebersihan sampah untuk pelaku usaha di kawasan Pantai Amal dan melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 serta mengeruk pasir penyebab tersumbatnya aliran air laut dan penanaman pohon bakau juga pemerintah berfokus pada peningkatan infrastuktur serta aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Berikut Tabel Bentuk Partisipasi Masyarakat Pantai

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Pantai Amal

No	Bentuk Partisipasi	Kegiatan Yang Dilakukan	Pihak Yang Berpartisipasi
1	Tenaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dan komunitas melakukan kegiatan perawatan/pengelolaan objek wisata berupa kegiatan kebersihan seperti melakukan kerja bakti berupa membersihkan sampah – sampah organik dan <i>non</i> organik disekitar kawasan objek wisata pantai amal seperti sampah plastik dan kayu mati. Namun dikarenakan pandemi Covid-19 beberapa kegiatan rutin dihentikan 2. Melakukan kegiatan pengerukan pasir yang menyebabkan tersumbatnya aliran sungai ke laut 3. Melakukan penanaman pohon seperti pohon kelapa dan ketapang 4. Pembangunan siring serta penjagaan di sekitar Pantai Amal agar tidak abrasi 5. Meningkatkan mutu makan serta ekonomi dengan membuka usaha berupa warung makan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Komunitas • Pemerintah
2	Keterampilan	Masyarakat mempunyai keterampilan dalam mengelola hasil laut menjadi kuliner yang khas dan terkenal di Kota Tarakan yaitu olahan karang laut yang bernama Kappah	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat
3.	Partisipasi social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan protokol Kesehatan selama pandemi Covid-19 2. Mengikuti aturan pemerintah untuk tidak membuang sampah disekitar kawasan objek wisata Pantai Amal terutama di laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat
4.	Uang	Masyarakat mengeluarkan dana pribadi untuk membuka warung makanan diatas lahan yang sudah disediakan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Masyarakat

Sumber: Peneliti, 2021

4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pantai Amal

Tingkat partisipasi masyarakat di Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki dua tangga partisipasi yaitu kemitraan (*partnership*) dan penentraman (*placation*). Tingkat pertama berada pada

tingkatan paling tinggi yaitu *Citizen Power* pada tingkatan partisipasi masyarakat, dalam tingkatan kedua ada *Tekonism* sudah ada komunikasi dua arah antara masyarakat dan pihak dinas pariwisata dengan nama program Pesonna Indonesia, masyarakat diberi wewenang dari untuk mengurus keperluan dan kebutuhan untuk perkembangan di Pantai Amal.

Berikut hasil wawancara dari masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam partisipasi tersebut :

“Cukup banyak...”(TH W2 17112020, 9-10)

“Jadi masyarakat yang ada di Pantai Amal disediakan slot berupa lahan kosong untuk membuka usaha apa saja yang ingin dibuat masyarakat, dan kami dari dinas pariwisata menyediakan infrastruktur untuk masyarakat yang ingin membuat usaha....” (IM W1 15112020, 4-8)

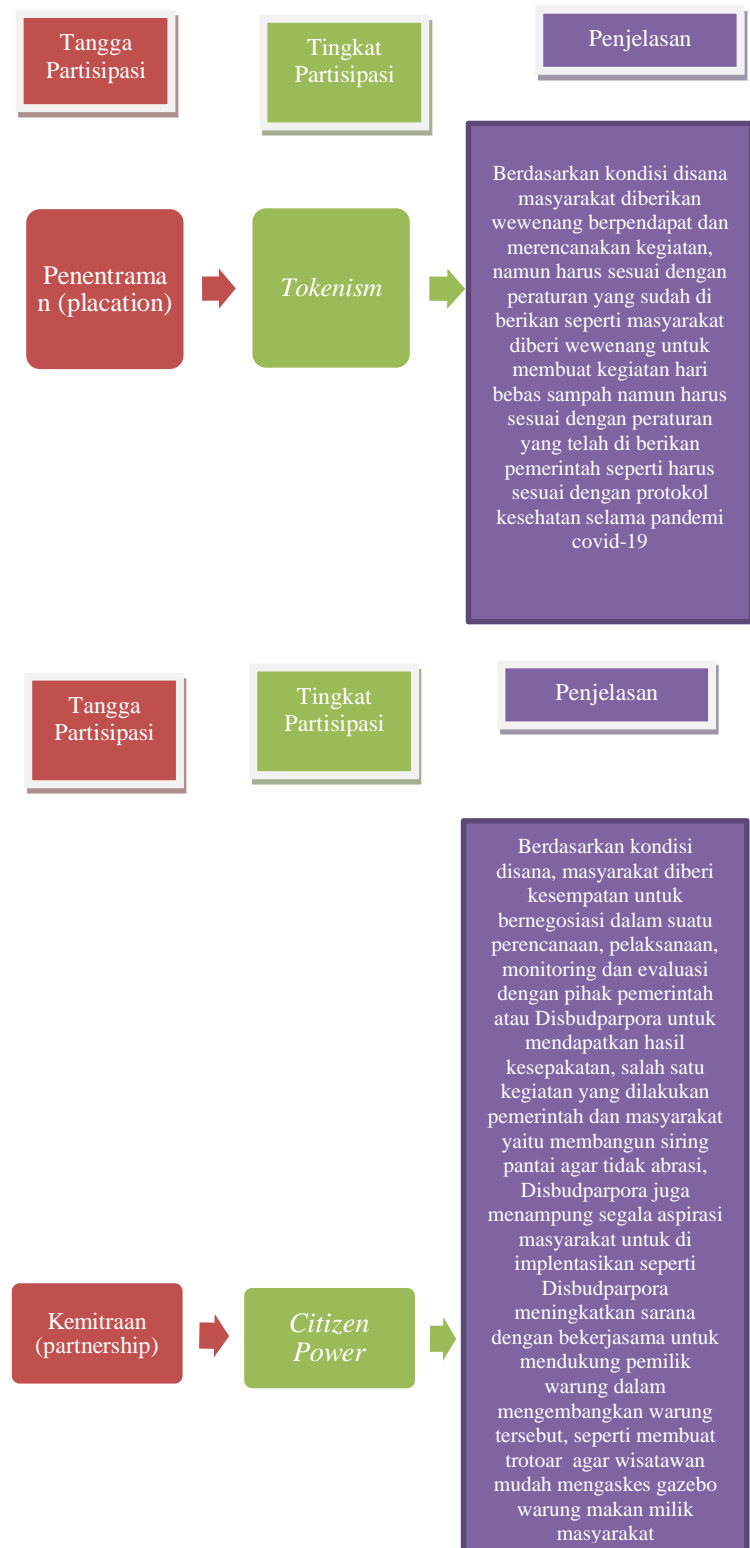
“....Pemerintah menyediakan lahan untuk kita masyarakat disini, untuk membuka usaha....” (TH W2 17112020, 10-11)

“....Kebanyakan kami membuka warung makan, seperti jualan es kelapa sama kappah....” (TH W2 17112020, 11-12)

. “....Pengelolaan di pantai sini dek, itu tanggung jawab setiap pemilik warung, jadi setiap warung punya lahan yang sudah ditentukan dari pemerintah....” (TH W2 17112020, 12-13)

“.... Kalau saya ini, di warung saya, kita buat gazebo di pinggir pantai, jadi orang datang makan di gazebo”(TH W2 17112020, 13-14)

“.... Untuk peraturan kami, ikutin peraturan yang sudah diberikan pemerintah, kaya jangan buang sampah sembarangan, selalu menjaga kebersihan disekitar warung kami, sama ikutin prtokol kesehatan....” (TH W2 17112020, 14-15)



Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Gambar 7 Diagram Tigkat Partisipasi

5. KESIMPULAN

Analisis potensi bentuk dan partisipasi masyarakat di Pantai Amal. Berdasarkan tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan Arnstein (1969), masyarakat di Pantai Amal terlibat dalam tangga partisipasi penentruman (*placation*) dan kemitraan (*partnership*). Pada masa mendatang, diharapkan pengelolaan Pantai Amal dapat mencapai tangga partisipasi *citizen power*, dimana, kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat kuat, bahkan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintah daerahnya. Bentuk partisipasinya cukup baik dimana masyarakat mengikuti beberapa peraturan pemerintah seperti menjaga kebersihan, melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan gotong royong membersihkan Pantai Amal, namun masih kurang inovasi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan daya tarik wisata Pantai Amal. Partisipasi Pantai Amal sudah cukup baik dimana masyarakat mengelola Pantai Amal dengan membuat warung membuat gazebo, namun masih belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan di karenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan, sehingga kurangnya atraksi di Pantai Amal, kurangnya aspirasi masyarakat dalam menyalurkan ide untuk Pantai Amal, sehingga pemerintah perlu melakukan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengelola Pantai Amal dengan optimal, sehingga mampu melahirkan atraksi dan inovasi baru dan dapat meningkatkan daya tarik wisata di Pantai Amal

6. REFERENSI

- Deswati, R. H. (2015). *Tingkat Partisipasi Masyarakat*. Jakarta Utara: Ancol Timur
- Ketut, M. (2016, february 1). *Daya Tarik Wisata*. Bali: Kuta
- Khotib, A. (2016, oktober 9). *Partisipasi Publik a'la Arnstein*. Jakarta Pusat: Tanah Abang
- None. (n.d.). *Pengertian Partisipasi*. Yogyakarta: Depok
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Delamartha, A. H., Yudana, G., & Rini, E. F. (2021). Kesiapan Aksesibilitas Wisata Dalam Mengintegrasikan Obyek Wisata (Studi Kasus: Karanganyar Bagian Timur). *Jurnal Plano Buana*, 1(2), 78–91.
- Jaenuddin, M. T. (2014). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 67–71.
- Kaltara, P. (2019). *Pantai Amal, Nasibmu Kini: Melihat Kondisi Destinasi Wisata Tertua di Paguntaka*. <https://kaltara.prokal.co/read/news/25710-pantai-amal-nasibmu-kini/6>
- Mason, P. (2003). *Tourism Impacts, Planning and Management*. Butterworth Heinemann.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber yang Diperluas* (2nd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- Saway, W. V., Alvianna, S., Estikowati, Lasarudin, A., & Hidayatullah, S. (2021). Dampak Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Pantai Pasir Putih Kabupaten Manokwari terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 6(1), 1–8.
- Setyanto, I., & Pangestuti, E. (2019). Pengaruh Komponen Destinasi Wisata (4A) terhadap Kepuasan Pengunjung Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 72(1), 157–167.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

- Yoeti, A. (1997). *Perencanaan dan Perkembangan Pariwisata*. PT Pradyanta Paramita.
- Ratika, T. W., (2019). Evaluasi Masterplan Kawasan Baron Berdasarkan Aspek Fisik, Ekonomi, Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Plano Madani*, 8(2), 180-181

